

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi merupakan hal penting dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Standar akuntansi akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Standar akuntansi secara umum diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi- sanksi untuk setiap ketidakpatuhan (Belkaoui dalam Mulyani, 2015).

Salah satu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan- Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) pada tanggal 19 Mei 2009. SAK- ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan alternatif standar akuntansi keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP merupakan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang berlaku umum, sehingga diharapkan dapat lebih mudah untuk dipahami. Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi, UMKM, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Silvia, 2015).

SAK ETAP disusun terpisah dari SAK yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). SAK ETAP yang terpisah dari PSAK adalah karena PSAK yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dinilai terlalu kompleks jika diterapkan oleh usaha kecil di Indonesia. Maka dari itu diperlukan standar yang lebih sederhana dan memudahkan usaha kecil dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Sen Young (2010), dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memuat ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Salah satu entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi berlandaskan asas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 menyebutkan bahwa tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Salah satu tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan keuangan secara benar dan tertib. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi.

Sesuai dengan surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, maka koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Jumlah koperasi di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Provinsi Jawa Timur menempati posisi jumlah koperasi terbanyak dibanding dengan provinsi lainnya yaitu sebanyak 31.182 koperasi dengan rincian 27.472 koperasi aktif dan 3.710 koperasi tidak aktif. Jumlah koperasi di Kabupaten Jember terbanyak diseluruh Jawa Timur. Saat ini ada kurang lebih 1800 koperasi yang berdiri di Kabupaten Jember. Setiap tahunnya sekitar 40 hingga 50 koperasi baru yang berdiri di Jember (www.diskop.jatimprov.go.id). Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi semakin tinggi. Namun pertumbuhan jumlah koperasi yang tinggi belum diringi dengan penerapan SAK ETAP yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian- penelitian terdahulu diketahui bahwa kebanyakan entitas tanpa akuntabilitas publik kurang paham tentang SAK ETAP, jadi dalam penyusunan laporan keuanganpun hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing- masing entitas.

Dalam menyusun laporan keuangan yang wajar ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya komponen laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Dimana dalam laporan laba rugi tercermin kinerja keuangan yang mencakup pendapatan dan beban. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba persaham (IAI, 2013). Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, oleh karena itu pendapatan seharusnya diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima oleh entitas.

Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Pengakuan beban dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat ekonomi dan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah

terjadi. Beban harus dicatat secara tepat karena menentukan laba perusahaan. Beban mencakup kerugian maupun beban timbul karena aktivitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ketepatan pencatatan beban yang tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan.

KSU Medan Rejeki merupakan salah satu koperasi yang berada di Jember, dalam hal pengungkapan terhadap akun- akun dalam laporan keuangan koperasi sudah menerapkan SAK ETAP meskipun belum secara sempurna menerapkannya. Adapun penerapan pengakuan pendapatan dan beban pada KSU Medan Rejeki masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena pengakuan pendapatan dan beban masih mengacu pada format yang pernah diajarkan Dinas Koperasi pada tahun 2004, sehingga berakibat pada penilaian pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan SAK yang berlaku dan berakibat pada ketidak wajaran nilai sisa hasil usaha koperasi yang tersaji dalam laporan laba rugi koperasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian kinerja keuangan koperasi sebab pengukuran kinerja keuangan koperasi sangat berhubungan erat dengan pendapatan dan beban yang akan terlihat pada laporan laba rugi koperasi. Selain itu KSU Medan Rejeki juga belum memisahkan pendapatan yang timbul akibat adanya transaksi dengan anggota dan non anggota. Sedangkan pada kenyataannya KSU Medan Rejeki Jember selain melayani anggota, juga melayani non anggota, namun penyajian pendapatan dari anggota dan non anggota tercantum menjadi satu dalam pendapatan bunga dan pendapatan administrasi. Selain pos pendapatan, pos beban pada KSU Medan Rejeki Jember juga belum sesuai dengan SAK ETAP, yaitu belum menyajikan pos beban pajak. Sedangkan pada kenyataannya pada KSU Medan Rejeki Jember sudah membayar pajak penghasilan sebesar 1% dari total pendapatan kotor. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi yang tersaji dalam laporan laba rugi koperasi karena pendapatan dan beban tidak di dinilai secara wajar sesuai dengan SAK yang berlaku pada prinsipnya pengakuan pendapatan dan beban harus mempertimbangkan adanya penerapan yang sesuai SAK ETAP agar dapat konsisten serta pendapatan dalam suatu periode tertentu tidak dinyatakan secara material terlalu besar atau kecil. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dalam

menyajikan laporan keuangannya perlu mengacu pada SAK ETAP sebagai standar pelaporan keuangan yang baku.

Beberapa hal tersebut merupakan pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian pada KSU Medan Rejeki di Kota Jember yang memiliki Badan Hukum No: 70/BH/KWK.13/III/1997. KSU Medan Rejeki termasuk dalam golongan entitas tanpa akuntabilitas publik dan belum menerapkan SAK ETAP dengan baik dan benar. Sehingga peneliti ingin melakukan suatu analisis terhadap perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada KSU Medan Rejeki Jember , kerana mengingat pentingnya arti pendapatan dan beban bagi suatu koperasi, serta masalah- masalah yang mungkin timbul dalam pengakuan pendapatan dan beban pada koperasi akan berpengaruh besar terhadap laba rugi usaha KSU Medan Rejeki Jember yang mempengaruhi kualitas kinerja keuangan koperasi sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam pengelolaan suatu usaha. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini mengambil judul **Penerapan Pengakuan Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP pada Laporan Keuangan KSU Medan Rejeki Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan pendapatan dan beban pada laporan keuangan KSU Medan Rejeki Jember ?
2. Apakah pengakuan pendapatan dan beban pada KSU Medan Rejeki Jember sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan dan beban pada laporan keuangan KSU Medan Rejeki Jember .

2. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban pada laporan keuangan KSU Medan Rejeki Jember pada SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak dan secara global akan memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi Pengurus Koperasi

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pengurus koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan periode- periode yang akan datang. Penerapan SAK ETAP diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan lengkap, sehingga informasi yang tersedia dapat diandalkan oleh pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian bidang sejenis dimasa yang akan datang.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK ETAP.